



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BOEDI LILIONO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **151469**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 417 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 119.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, HONDA AFX12U21CO8 M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.350.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 211.904.192**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.085.254.192



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.085.254.192

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.